

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS MASALAH PERZINAHAN DALAM PASAL 411
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang untuk
memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
YOSI HERMALIKA
21100010

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

TANDA PERSESTUJUAN SKRIPSI

NAMA : YOSI HERMALIKA
NPM : 21.10.0010
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM KEHUSUSAN : Hukum Pidana
JUDUL : Analisi Yuridis Masalah Perzinahan Dalam
Pasal 411 Undang-Undang No 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Palembang, Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Suryani Yusi, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Sakinah Agustina, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosi Hermalika

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/13 september 2002

NPM : 21.10.0010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data , informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, juli 2025

Yang membuat pernyataan


YOSI HERMALIKA

21100010

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Masalah Perzinahan Dalam Pasal 411 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Studi ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi hak asasi manusia pada Pasal 411 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana perzinahan perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi manusia dalam Islam. Perluasan makna zina pada Pasal 411 KUHP 2023 dianggap telah mengadopsi konsep zina ajaran agama terutama Islam dan memunculkan isu HAM dalam kategori pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Diaturkannya pelaku zina tidak terikat perkawinan ke dalam tindak pidana perzinahan, membuat negara dianggap telah jauh mengintervensi ranah privasi warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumendokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak asasi manusia di Indonesia sebagai hak konstitusional. Untuk itu, setiap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas kemanusiaan. Hak asasi manusia masih dapat dibatasi selama pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang, termasuk perumusan pada Pasal 411 KUHP 2023 tentang Perzinahan yang membatasi hubungan pribadi seseorang untuk menjaga dan melindungi hak atas rasa aman, kehormatan serta nama baik orang lain. Selain itu, menurut HAM dalam Islam, pasal 411 KUHP 2023 telah memberikan kemaslahatan dan menjamin hak masyarakat umum. Dengan adanya pidana terhadap pelaku zina baik yang terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan, telah memberikan hak perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan serta perlindungan hak anak dalam hal waris.

Kata kunci : Perzinahan, HAM, Hukum Islam.

ABSTRACT

The title of this thesis is "Legal Analysis of the Problem of Adultery in Article 411 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code" This study aims to explain the existence of human rights in Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code concerning the crime of adultery from the perspective of human rights in Indonesia and human rights in Islam. The expansion of the meaning of adultery in Article 411 of the 2023 Criminal Code is considered to have adopted the concept of adultery from religious teachings, especially Islam, and raises human rights issues in the category of violations of a person's right to privacy. The regulation of adulterers who are not bound by marriage into the crime of adultery makes the state considered to have intervened far in the realm of the privacy of its citizens. This study uses a type of juridical-normative research and library research by conducting a study of laws and regulations, legal documents, books, and journals related to the title of this thesis. The results of the study show that the position of human rights in Indonesia is as a constitutional right. For this reason, every law and regulation must refer to the principle of humanity. Human rights can still be limited as long as the restrictions are regulated by law, including the formulation in Article 411 of the 2023 Criminal Code concerning Adultery which limits a person's personal relationships to maintain and protect the right to a sense of security, honor and good name of others. In addition, according to human rights in Islam, Article 411 of the 2023 Criminal Code has provided benefits and guaranteed the rights of the general public. With the existence of criminal penalties for perpetrators of adultery, both those who are married and those who are not married, it has provided the right to protection of honor and descendants as well as protection of children's rights in terms of inheritance.

Keywords : adultery, human rights, Islamic law